



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL BAGI SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN, KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, maka perlu diberi biaya penunjang operasional tugas;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemberian biaya Operasional diatas, bertujuan untuk mendukung tugas sehari-hari pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan bermanfaat jangka pendek serta mendesak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas
dan wewenang pemerintah daerah di Indonesia.
Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Kabupaten/Mutual. Undang-Undang ini
mengatur tentang pembentukan, struktur, dan tugas
dan wewenang pemerintah kabupaten/mutual.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Kecamatan. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas dan
wewenang pemerintah kecamatan.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas dan
wewenang pemerintah desa.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Kelurahan. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas dan
wewenang pemerintah kelurahan.

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas dan
wewenang pemerintah desa.

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas dan
wewenang pemerintah desa.

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas dan
wewenang pemerintah desa.

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas dan
wewenang pemerintah desa.

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur
tentang pembentukan, struktur, dan tugas dan
wewenang pemerintah desa.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Penggantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) ;

11. Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Tanggungjawab Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomot 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL BAGI SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN, KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
5. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
7. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
8. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.
10. Beban Kerja adalah pekerjaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok fungsinya di masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
11. Biaya Operasional berdasarkan beban kerja adalah pemberian operasional tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dihitung secara bulanan atas beban pekerjaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Operasional berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah unuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian operasional berdasarkan beban kerja, untuk memberi motifasi kinerja bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

(3) Ruang

- (3) Ruang lingkup ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk pemberian dan pembayaran Operasional bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB III

PEMBERIAN OPERASIONAL BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang bekerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, Operasional berdasarkan beban kerja diberikan setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 4

Besaran Operasional berdasarkan beban kerja yang diberikan sesuai Jabatan dan Golongan sebagai berikut :

Jabatan	terima kotor (Rp)
a. Sekretaris Daerah	Rp. 25.000.000,-/PPh
b. Staf Ahli Bupati	Rp. 15.000.000,-/PPh
c. Asisten	Rp. 15.000.000,-/PPh
d. Kepala Bagian	Rp. 12.000.000,-/PPh
e. Kepala Sub Bagian	Rp. 7.000.000,-/PPh

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Operasional dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikut.
- (2) Pembayaran biaya operasional berdasarkan tugas dan fungsi dan jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (3) Khusus pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan tersebut.

Pasal 6

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara Golongan III dikenakan pajak penghasilan 5% (lima persen).
- b. Aparatur Sipil Negara Golongan IV dikenakan pajak penghasilan 15% (lima belas persen).

Pasal 7

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) biaya operasional berdasarkan beban kerja untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) biaya operasional berdasarkan beban kerja dapat dilengkapi dengan :

- a. Daftar

- a. Daftar Perhitungan Biaya Operasional berdasarkan beban kerja.
- b. Daftar hadir kerja pegawai setiap bulan berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Operasional bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 22 Februari 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal, 22 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004